



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
7. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten sebesar 95% (sembilan puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar 5% yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \{(0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)\} \times (\text{ADD}_{\text{Kab.}} - \text{AD}_{\text{Kab.}})$$

Keterangan:

ADD = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

AD_{Kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.

V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.

V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.

V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Total ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.77.937.689.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)** yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
- (2) Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Syarat pencairan ADD tahap I :
 - a. Menyampaikan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
 - d. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
 - e. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
 - f. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 - g. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati;
 - h. Laporan Inventaris Aset Desa Tahun Sebelumnya;
 - i. Pelunasan Pajak APBDesa dan Pajak Bumi Bangunan Desa tahun sebelumnya;
 - j. Data Profil dan Perkembangan Desa terbaru; dan
 - k. Laporan Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya.
- (2) Syarat pencairan ADD tahap II :
 - a. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022;
 - b. Peraturan Desa APBDes Murni / Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 - c. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
 - d. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
 - e. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
 - f. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya; dan
 - i. Laporan Realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2022 beserta foto kegiatan (format .jpg).

- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (5) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Belanja APBDes yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berupa :
 - a. Operasional Pemerintah Desa, Operasional Posyandu;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Bantuan Insentif Guru bantu, TK/PAUD, serta bantuan Insentif Kader Kesehatan Desa serta;
 - c. Jaminan Sosial Aparatur Desa yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - e. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dan sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN ADD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus maka dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa berkenaan APBDesa Perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **4 Januari 2022**.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 64.

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	638,282,000	20,979,000	659,261,000
		2 MALASAN	638,282,000	27,310,000	665,592,000
		3 BATU PUTIH	638,282,000	26,069,000	664,351,000
		4 MANGKAHUI	638,282,000	38,063,000	676,345,000
		5 PANUUT	638,282,000	26,329,000	664,611,000
		6 MUARA UNTU	638,282,000	81,735,000	720,017,000
		7 MUARA JAAN	638,282,000	28,215,000	666,497,000
		8 BAHITOM	638,282,000	47,818,000	686,100,000
		9 DANAU USUNG	638,282,000	32,795,000	671,077,000
		10 JUKING PAJANG	638,282,000	37,111,000	675,393,000
		11 MUARA SUMPOI	638,282,000	21,159,000	659,441,000
		12 MUARA BUMBAN	638,282,000	28,588,000	666,870,000
		13 PENYANG	638,282,000	27,047,000	665,329,000
			JUMLAH I		
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	638,282,000	20,679,000	658,961,000
		2 KONUT	638,282,000	80,767,000	719,049,000
		3 BELAWAN	638,282,000	31,286,000	669,568,000
		4 MANGKOLISOI /	638,282,000	30,176,000	668,458,000
		5 KALANG KALUH	638,282,000	34,219,000	672,501,000
		6 MANTIAT PARI	638,282,000	31,020,000	669,302,000
		7 OLONG ULU	638,282,000	45,265,000	683,547,000
		8 PURUK BATU	638,282,000	35,214,000	673,496,000
		9 OLUNG SIRON	638,282,000	50,796,000	689,078,000
		10 TINO TALIH	638,282,000	33,654,000	671,936,000
		11 OLUNG NANGO	638,282,000	59,310,000	697,592,000
		12 MAHANYAN	638,282,000	23,785,000	662,067,000
		13 DIRUNG BAKUNG	638,282,000	27,952,000	666,234,000
		14 TABULANG	638,282,000	34,636,000	672,918,000
		15 CANGKANG	638,282,000	29,183,000	667,465,000
		16 OLUNG DOJOU	638,282,000	22,213,000	660,495,000
		17 DOAN ARUNG	638,282,000	24,758,000	663,040,000
		18 MUWUN	638,282,000	26,755,000	665,037,000
		19 NONO KLIWON	638,282,000	48,781,000	687,063,000
		20 KOLAM	638,282,000	71,077,000	709,359,000
		21 SARUHUNG	638,282,000	28,085,000	666,367,000
		22 OLUNG SOLOI	638,282,000	24,416,000	662,698,000
		23 TOKUNG	638,282,000	31,173,000	669,455,000
		24 OLUNG BALO	638,282,000	29,641,000	667,923,000
		25 KARALI	638,282,000	46,564,000	684,846,000
		26 OSOM TOMPOK	638,282,000	31,272,000	669,554,000
	JUMLAH II			17,548,009,000	
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	638,282,000	39,912,000	678,194,000
		2 OLUNG MURO	638,282,000	60,448,000	698,730,000
		3 OLUNG HANANGAN	638,282,000	54,720,000	693,002,000
		4 DIRUNG LINGKIN	638,282,000	46,514,000	684,796,000
		5 DATAH KOTOU	638,282,000	69,398,000	707,680,000
		6 TAHUJAN ONTU	638,282,000	27,436,000	665,718,000
		7 PURUK KAMBANG	638,282,000	16,134,000	654,416,000
	JUMLAH III			4,782,536,000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBANG TUHUP	638,282,000	34,573,000	672,855,000
		2	MAKUNJUNG	638,282,000	34,615,000	672,897,000
		3	DIRUNG SARARONG	638,282,000	46,176,000	684,458,000
		4	KOHONG	638,282,000	28,645,000	666,927,000
		5	HINGAN TOKUNG	638,282,000	38,230,000	676,512,000
		6	LIANG NYALING	638,282,000	28,788,000	667,070,000
		7	TUMBANG BAUH	638,282,000	40,366,000	678,648,000
		8	TUMBANG MASALO	638,282,000	33,822,000	672,104,000
		9	BATU TOJAH	638,282,000	43,733,000	682,015,000
		10	TUMBANG BALOI	638,282,000	33,601,000	671,883,000
		11	CINTA BUDIMAN	638,282,000	57,955,000	696,237,000
				JUMLAH IV		
5	LAUNG TUHUP	1	Batu Tuhup	638,282,000	16,522,000	654,804,000
		2	Tumbang Bahan	638,282,000	26,344,000	664,626,000
		3	Muara Laung II	638,282,000	24,630,000	662,912,000
		4	Beras Balange	638,282,000	19,373,000	657,655,000
		5	Pelaci	638,282,000	20,313,000	658,595,000
		6	Biha	638,282,000	38,225,000	676,507,000
		7	Dirung Pundu	638,282,000	28,913,000	667,195,000
		8	Dirung Pinang	638,282,000	25,465,000	663,747,000
		9	Muara Tupuh	638,282,000	43,759,000	682,041,000
		10	Narui	638,282,000	41,633,000	679,915,000
		11	Tumbang Bana	638,282,000	20,842,000	659,124,000
		12	Lakutan	638,282,000	36,412,000	674,694,000
		13	Tawai Haui	638,282,000	23,667,000	661,949,000
		14	Penda Siron	638,282,000	18,687,000	656,969,000
		15	Muara Maruwei I	638,282,000	19,059,000	657,341,000
		16	Muara Maruwei II	638,282,000	21,442,000	659,724,000
		17	Beralang	638,282,000	26,642,000	664,924,000
		18	Kalang Dohong	638,282,000	27,012,000	665,294,000
		19	Batu Bua II	638,282,000	29,862,000	668,144,000
		20	Tahujan Laung	638,282,000	27,027,000	665,309,000
		21	Tumbang Bondang	638,282,000	41,528,000	679,810,000
		22	Tumbang Tonduk	638,282,000	28,343,000	666,625,000
		23	Batu Karang	638,282,000	19,669,000	657,951,000
		JUMLAH V			15,305,855,000	
6	PERMATA INTAN	1	Sungai Gula	638,282,000	28,697,000	666,979,000
		2	Sungai Batang	638,282,000	23,464,000	661,746,000
		3	Tumbang Salio	638,282,000	29,913,000	668,195,000
		4	Purnama	638,282,000	30,055,000	668,337,000
		5	Sungai Lobang	638,282,000	21,100,000	659,382,000
		6	Pantai Laga	638,282,000	75,127,000	713,409,000
		7	Baratu	638,282,000	33,073,000	671,355,000
		8	Juking Sopan	638,282,000	38,801,000	677,083,000
		9	Muara Babuat	638,282,000	34,853,000	673,135,000
		10	Sungai Bakanon	638,282,000	33,802,000	672,084,000
		JUMLAH VI			6,731,705,000	
7	SUMBER BARITO	1	Kalapeh Baru	638,282,000	27,210,000	665,492,000
		2	Tumbang Masao	638,282,000	35,482,000	673,764,000
		3	Batu Makap	638,282,000	32,111,000	670,393,000
		4	Olong Liko	638,282,000	50,655,000	688,937,000
		5	Teluk Jolo	638,282,000	28,809,000	667,091,000
		6	Laas Baru	638,282,000	29,871,000	668,153,000
		7	Tumbang Molut	638,282,000	52,935,000	691,217,000
		8	Tumbang Tuan	638,282,000	39,272,000	677,554,000
		JUMLAH VII			5,402,601,000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUNGAI BABUAT	1	Batu Mirau	638,282,000	26,378,000	664,660,000
		2	Tambelum	638,282,000	21,237,000	659,519,000
		3	Tumbang Bantian	638,282,000	23,535,000	661,817,000
		4	Tumbang Saan	638,282,000	20,295,000	658,577,000
		5	Tumbang Kolon	638,282,000	23,129,000	661,411,000
		6	Tumbang Apat	638,282,000	21,734,000	660,016,000
		JUMLAH VIII				3,966,000,000
		9	SERIBU RIAM	1	Tumbang Tohan	638,282,000
2	Tumbang Naan			638,282,000	30,716,000	668,998,000
3	Muara Joloi I			638,282,000	26,446,000	664,728,000
4	Muara Joloi II			638,282,000	26,932,000	665,214,000
5	Parahau			638,282,000	36,684,000	674,966,000
6	Tumbang Jojang			638,282,000	21,255,500	659,537,500
7	Takajung			638,282,000	36,009,000	674,291,000
JUMLAH IX						4,677,755,500
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	638,282,000	23,600,000	661,882,000
		2	TUMBANG OLONG / TUMBANG OLONG I	638,282,000	67,772,000	706,054,000
		3	KALASIN	638,282,000	19,563,000	657,845,000
		4	TUMBANG TOPUS	638,282,000	18,507,000	656,789,000
		5	TUMBANG OLONG II	638,282,000	19,895,000	658,177,000
		JUMLAH X				3,340,747,000
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					77,937,698,500	

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN APBDESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MURUNG RAYA**

PAGU DESA : Rp.....

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					6	7			8	9	10	
1	PENDAPATAN											
1.2	PENDAPATAN TRANSFER											
1.2.1	DANA DESA											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PENYERTAAN MODAL											
3.1	Penyertaan Modal Desa											
3.1.1	Modal Awal											
3.1.1.2	Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA PEMBIAYAAN)							0.00					

KEPALA DESA

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003



KAUR KEUANGAN

.....

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**RINCIAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN DAN HONORARIUM / TAMBAHAN
HONORARIUM**

NO	JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN TETAP PERBULAN (RP)
I. APARAT PEMERINTAH DESA		
1.	KEPALA DESA	2,460,000
2.	SEKRETARIS DESA NON PNS	2,255,000
3.	KEPALA URUSAN TU & UMUM	2,050,000
4.	KEPALA URUSAN KEUANGAN	2,050,000
5.	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	2,050,000
6.	KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN	2,050,000
7.	KEPALA URUSAN PELAYANAN	2,050,000
8.	KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN	2,050,000
II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
BESARNYA PENGHASILAN TETAP PERBULAN (RP)		
1.	KETUA BPD	2,100,000
2.	WAKIL KETUA BPD	1,800,000
3.	SEKRETARIS BPD	1,650,000
4.	ANGGOTA	1,400,000
III. TUNJANGAN PEJABAT KEPALA DESA DAN INSENTIF KETUA RT/RW, PENJAGA MALAM, CLEANING SERVIS DAN TUKANG KEBUN		
BESARNYA PENGHASILAN TETAP PERBULAN (RP)		
1.	TUNJANGAN PEJABAT KEPALA DESA	1,900,000
2.	INSENTIF STAF KAUR/KASI	1,100,000
3.	INSENTIF TUKANG KEBUN	600,000
4.	INSENTIF PENJAGA MALAM	600,000
5.	INSENTIF CLEANING SERVIS	600,000
6.	INSENFIT KETUA RT/RW	200,000
IV. BANTUAN INSENTIF GURU BANTU, TK/PAUD, SERTA BANTUAN INSENTIF KADER KESEHATAN DESA		
BESARNYA PENGHASILAN TETAP PERBULAN (RP)		
1.	BANTUAN INSENTIF GURU BANTU, TK/PAUD	250,000
2.	BANTUAN INSENTIF KADER KESEHATAN	150,000

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003